

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Wewenang untuk menjalankan kewenangan yang terdesentralisasi telah dilakukan di negara Indonesia. Pelaksanaan pemerintahan otonomi daerah (sistem pemerintahan desentralisasi) pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam mengurus pemerintahan masing-masing daerah. Perbedaan adat istiadat dan karakter budaya setiap daerah menjadikan sistem desentralisasi dinilai lebih demokratis (Rochjadi, 2006). Pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah penetapan sumber pendapatan daerah yang akan digunakan secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap daerah (Ismail, 2018). Dengan mengacu pada otonomi daerah (desentralisasi fiskal), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, wewenang yang didelegasikan kepada pemerintah daerah untuk memperkuat kekuasaan dalam membiayai program-program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan pendapatan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjadi dasar kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah. Jenis pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan meliputi sebelas macam pajak

kabupaten/kota dan pajak provinsi (dengan peraturan baru Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis pajak kabupaten/kota ditambahkan ke PBB, BPHTB, dan pajak sarang burung walet). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak daerah dan retribusi daerah yang cukup potensial dan memberikan kontribusi pendapatan negara dibandingkan dengan yang lain (Utomo, 2011). PBB dikenakan terhadap benda yang berupa seluruh tanah dan bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. PBB dapat berupa pajak daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah.

Pelaksanaan kewenangan daerah dalam pemungutan PBB direalisasikan pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Karo. Pelaksanaan kewenangan daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. BPKPAD Kabupaten Karo menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dalam upaya memperluas pendapatan daerah.

Penyelenggaraan keuangan daerah diwujudkan secara efisien, efektif, akuntabel, dan transparan yang dilaksanakan dengan konsep anggaran berbasis kinerja. Rancangan tersebut menekankan pada unsur-unsur yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan fungsi pelayanan publik. Tiga unsur dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu; secara efisiensi mencapai hasil yang optimal dengan biaya yang minimal, efektivitas dalam mencapai target yang telah ditetapkan, dan ekonomis dapat meminimalkan sumber daya input yang digunakan (Bangun, 2019).

Pemahaman tentang kinerja pengelolaan keuangan daerah menjadi sorotan publik dalam pelaksanaan kewenangan daerah. Masyarakat sering menganggap lembaga pemerintahan sebagai institusi yang merugi, sarang pemborosan, dan inefisiensi (Purwiyanti, 2017). Rakyat pada umumnya semakin mudah mengakses informasi juga menuntut akuntabilitas dan transparansi lembaga pemerintahan. Akuntabilitas dan transparansi sering dikenal dengan pengukuran kinerja di organisasi sektor publik tersebut (Megarani, dkk, 2018).

Evaluasi kinerja pemungutan PBB (P2) yang dikelola oleh BPKPAD Kabupaten Karo akan memberikan manfaat sebagai informasi pengukuran kinerja. Penulis dalam hal ini mengangkat karya tulis yang berjudul “EVALUASI KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARO DALAM PEMUNGUTAN PBB (P2)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bertautan dengan latar belakang masalah yang dihadapi, permasalahan dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana hasil pengolahan data terkait evaluasi kinerja BPKPAD Kabupaten Karo dalam pemungutan PBB (P2)?
2. Bagaimana evaluasi kinerja BPKPAD Kabupaten Karo dalam pemungutan PBB (P2) pada tahun 2019-2021?
3. Apa faktor penghambat dan pendukung kinerja BPKPAD Kabupaten Karo dalam pemungutan PBB (P2)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada masalah yang dirumuskan, maksud penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui bagaimana hasil pengolahan data terkait evaluasi kinerja BPKPAD Kabupaten Karo dalam pemungutan PBB (P2).
2. Mengetahui bagaimana evaluasi kinerja BPKPAD Kabupaten Karo dalam pemungutan PBB (P2) pada tahun 2019-2021.
3. Mengetahui apa faktor penghambat dan pendukung kinerja BPKPAD Kabupaten Karo dalam pemungutan PBB (P2).

### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Terkait penulisan penelitian ini, yaitu kinerja BPKPAD Kabupaten Karo dalam memungut PBB (P2). Penulis ingin mengetahui apakah BPKPAD Kabupaten Karo dalam pemungutan PBB (P2) pada tahun 2019-2021 sudah efisien dan efektif. Data yang diolah terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif pada penelitian ini adalah data realisasi dan target PBB (P2) di Kabupaten Karo, serta realisasi biaya dan anggaran biaya yang dikeluarkan untuk memungut PBB (P2). Data kualitatif selama penelitian ini adalah faktor penghambat dan pendukung pemungutan PBB (P2), struktur organisasi, sejarah berdirinya BPKPAD Kabupaten Karo, misi dan visi.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Berikut ini adalah manfaat yang dihasilkan dari karya tulis yang berjudul “EVALUASI KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,

## PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARO DALAM PEMUNGUTAN PBB (P2)”. 1) Manfaat teoritis

Karya tulis diharapkan sebagai bagian yang menyempurnakan dan melengkapi pengetahuan atau sudut pandang terkait dengan evaluasi kinerja organisasi publik dalam pemungutan pajak.

### 2) Manfaat praktis

#### a. Bagi penulis

Karya tulis diharapkan sebagai komponen dalam penyelesaian tugas akhir dari penulis bersangkutan dengan pembuatan karya tulis serta peluang dalam mengejawantahkan ilmu dalam mata kuliah Perpajakan.

#### b. Bagi pemangku kepentingan terhadap BPKPAD Kabupaten Karo

Karya tulis diharapkan sebagai data kinerja yang telah diwujudkan BPKPAD Kabupaten Karo dalam tahun tertentu sebagai pengambilan kebijakan berdasarkan evaluasi kinerja yang diteliti serta memperhitungkan perbaikan dan imbalan terhadap kinerja BPKPAD Kabupaten Karo.

#### c. Bagi peneliti lain

Karya tulis tersebut dapat digunakan oleh pihak lainnya sebagai dasar dalam melakukan penelitian selanjutnya berdasarkan kekurangan maupun kelebihan yang dimiliki.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini memaparkan hal-hal umum terkait dengan penjelmaan karya tulis yang meliputi latar belakang yang berisi alasan penulis mengangkat tema yang berhubungan dengan pemungutan PBB (P2); rumusan masalah yang berisi perihal masalah yang akan dicari jawabannya; tujuan penelitian yang berhubungan dengan pencarian jawaban atas rumusan masalah; ruang lingkup penelitian yang membatasi pembahasan dalam karya tulis; manfaat penelitian, yaitu dampak dari karya tulis yang dihasilkan; metode pengumpulan data yang memerinci sumber data yang digunakan oleh penulis; dan sistematika penulisan KTTA yang merangkum bagian-bagian dari tubuh karya tulis yang bersangkutan.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini berisi konsep-konsep dasar yang digunakan sebagai fondasi untuk mendapatkan informasi evaluasi kinerja BPKPAD Kabupaten Karo dalam pemungutan PBB (P2).

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi pembahasan mengenai hasil pengolahan data untuk mengevaluasi kinerja BPKPAD Kabupaten Karo dalam pemungutan PBB (P2) dan analisis terkait data yang telah dihasilkan untuk mengarahkan penulis pada suatu kesimpulan bagaimana kinerja BPKPAD Kabupaten Karo dalam pemungutan PBB (P2).

## BAB IV KESIMPULAN

Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, analisis dan evaluasi yang telah dilakukan penulis mengenai kinerja BPKPAD Kabupaten Karo dalam pemungutan PBB (P2)